

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PAD, LEVERAGE,
DANA PERIMBANGAN DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra)**

**Oleh:
Indah Puspa Sari
Pembimbing: Restu Agusti dan Rofika**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: indahpuspasari28@yahoo.com*

*The effect of size of local government, local revenue, leverage, fund balance, and
legislative size of the financial performance
(Studies in regencie in Sumatra Island)*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of size of local government, local revenue, leverage, fund balance, and legislative size of the financial performance of regencie/municipalities in Sumatra Island. The population in this study are all regencie/municipalities in Sumatra Island. This study uses purposive sampling method. This research uses a sample 57 regencie/municipalities. The data of this study using secondary data in website www.djpk.depkeu.go.id. This study uses multiple linear regression analysis. The result of this study indicated that the size of local government, local revenue and fund balance are factors that effect the financial performance of local government. Leverage and legislative size had no effect on financial performance of local government.

Keyword: Financial performance, local government, local revenue, fund balance and legislativesize

PENDAHULUAN

Kewenangan otonomi menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Otonomi daerah mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk

menjalankan wacana tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Sumarjo, 2010). Dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah tidak selancar yang diharapkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja keuangan daerah menjadi perhatian

masyarakat. Berbagai macam peraturan keuangan yang diterbitkan ternyata tidak selalu diiringi dengan peningkatan hasil kinerja keuangan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah mulai dari adanya berbagai penyimpangan sampai pengungkapan yang tidak jelas dalam hal pengelolaan keuangan (Kusumawardani, 2012).

Senin, 1 Juni 2015 dalam website pekanbaru.bpk.go.id BPK ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian *intern* dalam penyusunan laporan keuangan. BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, aset tetap Pemko Pekanbaru pada neraca 31 Desember 2014 belum disajikan secara lengkap dan akurat. Selain itu tanah Hak Pengelolaan (HPL) ternyata belum tercatat di neraca. Di provinsi lain, kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Aceh masih buruk (dikutip dari media Waspada online, 2012). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2010 ditemukan bukti bahwa belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota Tahun Ajaran 2009 belum dipertanggungjawabkan dan berpotensi disalahgunakan oleh penerima bantuan. Pada tahun 2012, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi tinggi, yaitu dengan CPI (*Corruption Perceptions Index*) sebesar 3,0 (dengan kisaran 0-10) (*Transparency.org*).

Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja

keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012).

Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi financial seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2009).

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Bruijn (2002) pada pemerintah daerah di Jerman, serta Nolan, Moore, dan Chan (2004) di U.S.A dan Kanada. Di Indonesia, penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Hamzah (2009) yang meneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur.

Penelitian ini berusaha mengembangkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, *leverage*, dana perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? 2) Apakah PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? 3) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? 4) Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? 5) Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk: 1) menguji dan membuktikan pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2) menguji dan membuktikan pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 3) menguji dan membuktikan pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 4) menguji dan membuktikan pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 5) menguji dan membuktikan pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 1) Bagi pihak pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak

Pemerintah Daerah/kota mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, *leverage*, dana perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah, 2) Bagi pihak lainnya, sebagai referensi tambahan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemda, 3) Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan, terutama mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, *leverage*, dana perimbangan, dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan

Keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan keuangan daerah adalah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 keuangan

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi daerah yang dinilai dengan aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tersebut.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991). Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintahan daerah. Dengan jumlah aset/pegawai/ produktifitas yang lebih besar sehingga diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang lebih kecil (Patrick, 2007) dalam Lesmana (2010). Dalam penelitian ini, total aset atau total aktiva pemerintah daerah dipilih sebagai

tolak ukur dalam menentukan ukuran suatu pemerintahan daerah.

Total aset dipilih karena nilainya yang lebih stabil daripada pendapatan, jumlah pegawai ataupun total produksi suatu daerah. Lesmana (2010), Sumarjo (2010), Yulianingtyas (2011) dan Syafitri (2012) menggunakan ukuran total aset dalam mengukur ukuran pemerintah. Semakin besar aset yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut.

Pendapatan asli daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah yang diatur oleh peraturan daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. PAD adalah salah satu wujud kemandirian daerah sehingga harus selalu dipacu pertumbuhannya (Halim, 2004).

PAD adalah sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Mardiasmoro, 2002). Besarnya PAD yang diterima daerah dapat menjadi ukuran dalam menilai kinerja pemerintah daerah, karena semakin besar angka PAD juga menunjukkan bahwa pemerintah

daerah mampu mendayagunakan sumber daya dan potensi yang ada pada kewenangannya.

Leverage

Dalam akuntansi sektor publik, *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya. Daerah yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Dalam pemerintahan daerah, perhitungan rasio *leverage* penting dilakukan bagi kreditor dan calon kreditor dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Sumarjo, 2010).

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana perimbangan disebut juga transfer dilakukan oleh pemerintah pusat guna mendukung pendanaan program otonomi. Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya serta mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Selanjutnya dana perimbangan ditujukan untuk menjaga tercapainya

standar pelayanan minimum di setiap daerah.

Ukuran Legislatif

DPRD merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah (propinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum (Wikipedia.com, 2009). Dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di tiga wilayah administratif, yaitu di tingkat propinsi disebut DPRD Propinsi berkedudukan di ibukota provinsi, tingkat kabupaten disebut DPRD Kabupaten berkedudukan di ibukota kabupaten, dan tingkat kota disebut DPRD Kota, berkedudukan di kota.

Penelitian Terdahulu

Kusumawardani (2012) meneliti pengaruh *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 31,5% dan secara parsial menunjukkan bahwa variabel *size* dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sedangkan kemakmuran dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Wenny (2012) meneliti pengaruh pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan maupun

parsial mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Sesotyaningtyas (2012) juga meneliti pengaruh *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue* dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. pengujian secara simultan menunjukkan *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, dan pendapatan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi. Sedangkan secara parsial, variabel *leverage*, ukuran legislatif dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Sedangkan variabel pendapatan pajak daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Indrawan (2013) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor-faktor yang digunakan adalah PAD, *intergovernmental revenue* yang

diproksikan dengan dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kerangka Pemikiran, Hipotesis Dan Model Penelitian

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya. Penelitian Lesmana (2010), Sumarjo (2010), Yulianingtyas (2011) dan Syafitri (2012) menggunakan ukuran pemerintah daerah yang di proksikan dengan total aset. Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh PAD guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012).

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar

ukuran pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). PAD merupakan komponen pendapatan daerah yang harus terus dipacu pertumbuhannya. Pemerintah daerah dengan pendapatan yang besar diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik. Jika pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan yang besar namun kinerja efisiensinya dinilai masih buruk maka pemerintah daerah tersebut harus instropeksi dan melakukan perbaikan ke depannya. Pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan yang besar pasti memiliki tekanan yang lebih besar pula dari masyarakat untuk lebih baik dalam mengelola dan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya itu guna kemajuan daerah (Marfiana, 2013).

Simanullang (2013) menguji hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap

kinerja Pemda. Hasil penelitian Wenny (2012) serta Mustikarini dan Ritriyasi (2012) memberikan kesimpulan yang sama bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio utang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki daerah terbebani oleh utang dengan cara membandingkan antara total utang daerah dengan total aset daerah. Hasil yang didapat akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang (Sumarjo, 2010). Semakin tinggi *leverage* yang dimiliki maka dikatakan semakin buruk kinerja keuangan daerah. Artinya daerah tersebut belum mampu membiayai operasionalnya sendiri sehingga membutuhkan dana pinjaman dari pihak eksternal.

Sumarjo (2010) meneliti pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 :Leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan akan masuk kedalam akun pendapatan daerah sehingga meningkatkan total penerimaan daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Sumarjo (2010) melakukan penelitian untuk menemukan keterkaitan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dana perimbangan terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Perundang-undangan Indonesia telah membagi sistem pemerintahan negara dalam tiga lembaga yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ketiga lembaga itu memiliki peran masing-masing. Konsep pembagian kekuasaan diterapkan sampai di tingkat daerah dimana roda pemerintahan dikendalikan oleh lembaga eksekutif (Gubernur, walikota, bupati), lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga yudikatif (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi). Pembagian tugas ini memberikan ruang bagi setiap lembaga untuk menjalankan tugasnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat. Di samping itu, lembaga-lembaga tersebut juga melakukan pengawasan terhadap lembaga lainnya.

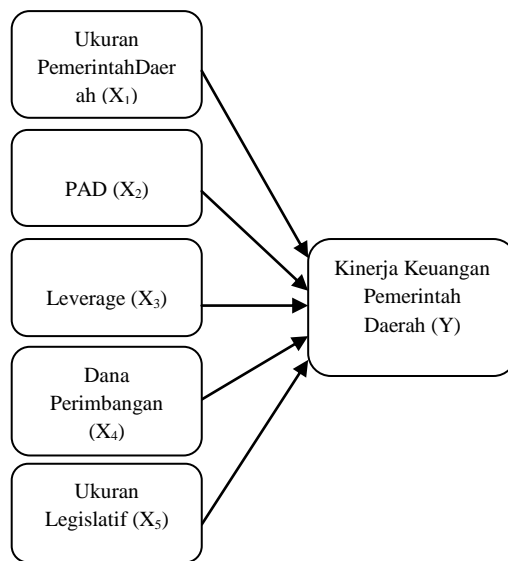
Lembaga Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah (Winarna dan Murni, 2007). Peran dari legislatif terdapat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran daerah. Lembaga legislatif harus memperhatikan seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima. Pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik (Hamzah, 2009).

Kusumawardani meneliti tentang pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa

ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Gambar 1
Model Penelitian**



Sumber: Penelitian terdahulu

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemerintah dan anggota DPRD kabupaten/kota di Pulau Sumatera pada tahun 2013 dengan total 154 Kabupaten/Kota. 57 Kabupaten/Kota tersebut menyajikan laporan neraca 2013, Laporan Realisasi Anggaran 2013 dan memberikan data jumlah anggota DPRD dalam website resmi daerahnya.

Metode sampel yang diterapkan adalah metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya

diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website departemen keuangan www.djpk.depkeu.go.id serta data non keuangan, seperti jumlah anggota DPRD didapat dari situs resmi masing-masing daerah.

Variabel Penelitian

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan melihat rasio efisiensi pemerintah daerah tersebut. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara pengeluaran (*output*) dan penerimaan (*input*). Penghitungan rasio efisiensi didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hamzah (2009), yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Realisasi Penerimaan}}$$

2. Ukuran Pemerintah Daerah

Proksi untuk variabel ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini menggunakan total aset. Total aset dapat diperoleh dalam laporan neraca daerah.

3. PAD

PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi-potensi daerah itu sendiri. Total PAD dapat diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) daerah.

4. Leverage

Leverage diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio* (DER) yaitu dengan membandingkan total utang dengan total ekuitas yang tersaji dalam laporan neraca. *Debt Equity Ratio* (DER) dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

5. Dana Perimbangan

Dana perimbangan disebut juga transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) daerah.

6. Ukuran Legislatif

Ukuran legislatif diukur dengan melihat jumlah anggota DPRD periode 2009-2014. Jumlah anggota DPRD dalam penelitian ini didapat dari situs resmi masing-masing pemerintah daerah.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Pengolahan data penelitian ini menggunakan program komputer statistik SPSS 17.0 (*Statistical Product and Service Solution*).

1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel ini menggunakan analisis statistik deskriptif, yaitu untuk mengukur variabel penelitian dengan *mean* (rata-rata), nilai minimum dan maksimum, dan standar deviasi setiap variabel

penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 17.0

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini normalitas menggunakan *P-P Plot*. Apabila *P-P Plot* memiliki titik-titik yang berada disekitar garis lurus, maka dapat diasumsikan bahwa data memiliki distribusi populasi yang normal, sedangkan jika terjadi sebaliknya maka data memiliki distribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini menguji ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat *scatter plot*. Jika pada *scatter plot* memiliki titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika membentuk pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran,

1992).Persamaan matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 UD + \beta_2 PAD + \beta_3 LVRG + \beta_4 DP + \beta_5 DPRD + \varepsilon$$

- Y = Kinerja Pemda
- α = Konstanta
- β = Koefisien
- UD = Ukuran Pemerintah Daerah
- PAD = PAD
- LVRG = *Leverage*
- DP = Dana Perimbangan
- DPRD = Ukuran Legislatif
- ε = error

Pengujian Hipotesis

Pengujian parameter individual dimaksudkan untuk melihat apakah variabel secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas dengan asumsi variabel bebas lainnyakonstan. Kriteria pengujian sebagai berikut :

a. Membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Bila t hitung < t tabel, variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Bila t hitung > t tabel, variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

b. Berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah minimum, maksimum dan mean. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
KKPD	57	36.77	99.69	70.16
UD	57	545905	25320724	3272353.66
PAD	57	6774	838592	52416.49
LVRG	57	0.0035508	9.3578952	1.07785
DP	57	36919	1217213	542277.4
DPRD	57	17	50	34.8
Valid N (listwise)	57			

Sumber: Data Output SPSS 2015

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda dari pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, Leverage, dana perimbangan dan ukuran legislatif dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.5746	0.4002		-11.43	0
UD	0.1201	0.0478	0.3316	2.513	0.015
PAD	0.0919	0.0421	0.2848	2.182	0.034
LVRG	1.588	0	0.0228	1.74	0.087
DP	0.1258	0.031	0.3678	4.06	0
DPR	0.00	0.10	0.003	0.04	0.96
D	47	71	7	4	5

Sumber: Output SPSS, 2015

Berdasarkan Tabel 2 maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -4,5745 + 0,1201UD + 0,0919PAD + 1,588LVRG + 0,1258DP + 0,0047DPR + \varepsilon$$

Dari persamaan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Ukuran pemerintah daerah. Diperoleh nilai t hitung (2,513) > t tabel (2,008) dengan p value (0,015) < α (0,05). Artinya adalah bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. PAD. Diperoleh nilai t hitung (2,182) > t tabel (2,008) dengan p value (0,034) < α (0,05). Artinya adalah bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c. *Leverage*. Diperoleh nilai t hitung (1,740) < t tabel (2,008) dengan p value (0,087) > α (0,05). Artinya adalah bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- d. Dana perimbangan. Diperoleh nilai t hitung (4,060) > t tabel (2,008) dengan p value (0,000) < α (0,05). Artinya adalah bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- e. Ukuran legislatif. Diperoleh dari nilai t hitung (0,044) < t tabel (2,008) dengan p value (0,965) > α (0,05). Artinya adalah bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 3
Hasil Pengujian Koefisien
Determinasi (R_2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.895 ^a	0.802	0.782	0.14044	2.082

Sumber: Output SPSS 2015

Berdasarkan tabel hasil pada Tabel diatas diketahui nilai Adjusted R^2 sebesar 0,782. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, *Leverage*, dana perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 78,2 %. Sedangkan sisanya sebesar 21,8 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari t hitung (2,513) > t tabel (2,008) dengan p value (0,015) < α (0,05).
2. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (2,182) > t tabel (2,008) dengan p value (0,034) < α (0,05).
3. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (1,740) < t tabel (2,008) dengan p value (0,087) > α (0,05).
4. Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (4,060) > t tabel (2,008) dengan p value (0,000) < α (0,05).
5. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (0,044) < t tabel (2,008) dengan p value (0,965) > α (0,05).

Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan lebih banyak sampel pemerintah daerah dengan tahun yang lebih panjang sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan data yang lebih signifikan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian agar lebih menggeneralisir faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang telah dilakukan ini dengan menambah variabel lain, seperti temuan audit BPK, belanja modal dan variabel lainnya yang diduga juga memiliki hubungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Abdul, Hendri, Sapto, dan Inapty, Biana Adha. 2009. Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Penelitian keuangan akuntansi sektor publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri*, Bidakara, 2-3 Juni 2009.
- Halim, Abdul. 2001. Anggaran daerah dan “fiscal stress” (sebuah studi kasus pada Anggaran daerah provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.
- Indrawan, M. Yusuf. 2013. Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Kinerja Pemerintah kabupaten/Kota. *Skripsi Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin*.
- Liestiani, Annisa. (2008). Pengungkapan LKPD Kab/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006. *Skripsi Sarjana*. FEUI. Depok.
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Skripsi.Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES*
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Patrick, P. A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. *Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University*.

Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sesotyangingtyas, Mirna. 2012. Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*.

Simanullang, Gideon. 2013. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan asli daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Umrah Journal of Accounting*.

Winarna, J and Murni, S. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Simposium Nasional Akuntansi X*.